

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Integritas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, khususnya transparansi dan akuntabilitasnya, secara intrinsik terkait dengan kualitas pelaporan keuangannya. Laporan keuangan yang baik mampu memberikan gambaran nyata terkait kondisi keuangan pemerintah serta mendukung proses pengambilan keputusan publik. Dalam lingkup pemerintahan kecamatan, kualitas laporan keuangan menjadi cerminan kemampuan manajerial dan administratif pemerintah di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pelaporan keuangan berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas utama dalam administrasi publik, terutama di tingkat regional. Laporan keuangan berkualitas tinggi tidak hanya menunjukkan transparansi dan tanggung jawab, tetapi juga menjadi landasan kritis untuk pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan regional. Di sektor publik, laporan keuangan yang kredibel harus mematuhi prinsip-prinsip inti seperti keandalan, relevansi, keterbandingan, dan kejelasan, sesuai dengan SAP. Sebagai unit pelaksana teknis pemerintahan lokal, kecamatan memikul tanggung jawab besar dalam memastikan penyiapan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Meskipun demikian, pencapaian standar tinggi dalam pelaporan keuangan seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, terutama termasuk kompetensi SDM dan efisiensi mekanisme pengendalian internal. Dalam kasus Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, kualitas

pelaporan keuangan telah menjadi isu kritis karena peran penting akuntabilitas fiskal di tingkat pemerintahan akar rumput. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur secara empiris dampak efektivitas modal manusia dan integritas pengendalian internal terhadap dimensi kualitatif, yaitu akurasi dan keandalan pelaporan keuangan di dalam pemerintahan kecamatan

Kemampuan sumber daya manusia dalam urusan keuangan merupakan faktor penentu yang krusial dalam produksi laporan keuangan berkualitas tinggi. Kemampuan ini mencakup pemahaman yang kokoh tentang prinsip-prinsip akuntansi, keahlian teknis, dan mindset profesional yang selaras dengan standar akuntansi yang berlaku. Pejabat yang memiliki kemampuan yang kuat lebih mampu dalam mengelola protokol pelaporan, menangani transaksi keuangan dengan akurat, dan mengurangi kemungkinan kesalahan selama penyusunan laporan. Di sisi lain, ketidakmampuan SDM yang tidak memadai dapat menyebabkan masalah seperti ketidakakuratan data, keterlambatan pengajuan, dan pengelolaan keuangan yang buruk. Dengan menerapkan pengawasan yang ketat, sistem pengendalian internal memainkan peran kritis dalam menjaga integritas data keuangan, berfungsi sebagai pertahanan utama terhadap kesalahan dan tindakan curang yang disengaja. Hubungan antara kompetensi SDM dan efektivitas pengendalian internal menjadi saling berkaitan, karena pengendalian yang baik membutuhkan pelaksana yang kompeten. Dalam penelitian ini, hubungan antara kedua variabel tersebut akan dianalisis untuk mengetahui kontribusi masing-masing terhadap kualitas laporan keuangan Kecamatan Batujajar. Pemahaman ini menjadi penting untuk

merumuskan strategi perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

Penelitian ini didorong lebih lanjut oleh bukti-bukti terbaru yang menyoroti masalah yang terus berlanjut dalam kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Menurut LHP tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPK, Kabupaten Bandung Barat terus menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Catatan (WDP), yang terutama disebabkan oleh kelemahan dalam pengendalian manajemen atas kas dan aset tetap (BPK, 2023). Data dari BPS Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa 14% kecamatan di wilayah ini, termasuk Batujajar, mengalami ketidaksesuaian dalam pelaporan aset daerah (BPS, 2023). Sebuah studi terbaru dari Databox (2024) mengidentifikasi peningkatan sebesar 5% dalam tren ketidakpatuhan, menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia menghadapi tekanan yang semakin besar dalam mematuhi standar pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya persoalan sistemik terkait kompetensi SDM dan lemahnya sistem pengendalian internal di tingkat lokal. Sejalan dengan itu, laporan dari jurnal internasional juga menyatakan bahwa faktor kompetensi SDM dan efektivitas pengendalian internal menjadi prediktor utama dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Mardawiyah, 2020). Fenomena ini menegaskan urgensi perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan di Kecamatan Batujajar. Menurut LHP BPK Tahun 2023, Kabupaten Bandung Barat masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), salah satunya akibat kelemahan pada sistem pengendalian pengelolaan kas dan pelaporan aset tetap.

Data dari BPS Kabupaten Bandung Barat juga menunjukkan bahwa 14% dari total kecamatan di wilayah tersebut, termasuk Kecamatan Batujajar, belum sepenuhnya memenuhi standar pelaporan aset tetap sesuai dengan SAP Di Kecamatan Batujajar, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kompetensi SDM dan efektivitas pengendalian internal. Kompetensi SDM yang rendah dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta ketidakakuratan dalam pengelolaan data keuangan. Hasil survei awal terhadap 27 pegawai pengelola keuangan di Kecamatan Batujajar menunjukkan variasi tingkat pendidikan yang cukup signifikan.

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Pengelola Keuangan Kecamatan Batujajar

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Persentase
S2 Akuntansi	5	14%
S1 Akuntansi	15	42%
S1 Non-Akuntansi	7	20%
D3 Keuangan	5	14%
SMA/K	3	8%
Total	35	100%

Sumber: Survei Primer, Peneliti (2025); LHP BPK 2025; BPS Kabupaten Bandung Barat (2025)

Survei juga menunjukkan bahwa hanya 40% pegawai yang pernah mengikuti pelatihan teknis terkait akuntansi pemerintahan dalam dua tahun terakhir. Untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar, fokus proaktif dalam meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan hal yang tidak dapat diabaikan.

Mendukung kompetensi SDM, sistem pengendalian internal yang kuat merupakan landasan penting untuk pelaporan keuangan yang andal. Sebaliknya, sistem pengendalian yang lemah menciptakan kerentanan, meningkatkan risiko kesalahan, manajemen yang buruk, dan aktivitas penipuan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar prosedur operasional standar (SOP) belum diperbarui secara berkala, dan kegiatan monitoring internal tidak dilakukan secara sistematis.

Penelitian ini dibangun di atas landasan kerja sebelumnya yang berharga. Daryanto (2020) telah menetapkan peran penting kompetensi SDM dan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan lokal di Asia Tenggara, yang diperkuat oleh teknologi informasi. Sumaryati dan Novitasari (2020) memvalidasi sinergi ini dalam konteks Indonesia. Dewi dan Suhendro (2025) lebih lanjut mengukuhkan faktor-faktor ini sebagai kunci kepatuhan terhadap standar, terutama dengan dukungan digital. Namun, Helmy dan Silviana (2024a) memberikan sudut pandang yang penting, menunjukkan bahwa meskipun kompetensi SDM berdampak positif pada kualitas, efektivitas praktis pengendalian internal mungkin masih kurang memadai. Selain itu, Lubis et al. (2023) menyoroti bahwa kepemimpinan organisasi yang kuat dapat memperkuat hubungan positif antara kemampuan tenaga kerja dan akurasi pelaporan keuangan. Temuan-temuan ini memberikan kerangka konseptual yang kuat, namun tetap terdapat ruang untuk pendalaman lebih lanjut.

Pentingnya kompetensi SDM dan pengendalian internal dalam kualitas pelaporan keuangan, meskipun telah banyak diteliti, masih meninggalkan

pertanyaan-pertanyaan spesifik yang belum terjawab; celah-celah yang masih ada ini menyoroti kebutuhan akan penelitian yang lebih mendalam dan terfokus pada area-area yang belum dieksplorasi. Mayoritas penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada tingkat pemerintah daerah kabupaten atau kota secara umum, sedangkan penelitian spesifik di tingkat kecamatan, seperti Kecamatan Batujajar, masih sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar studi sebelumnya belum menguji secara simultan pengaruh kedua variabel ini dalam konteks organisasi kecil dengan struktur pengendalian yang lebih sederhana seperti di kecamatan. Selain itu, penelitian sebelumnya telah memberikan eksplorasi yang terbatas mengenai interaksi antara kompetensi SDM, efektivitas pengendalian internal, dan implementasi praktis SAP di tingkat kecamatan.

Penelitian ini memiliki nilai yang signifikan karena bertujuan untuk mengungkap bagaimana kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Temuan ini dapat menjadi acuan strategis bagi pemerintah daerah yang belum mencapai Status WTP, dengan memberikan wawasan yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat praktik pelaporan mereka dan mencapai status WTP. Penjelasan tersebut, menjadi dasar peneliti ini yang menggunakan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk berkontribusi lebih lanjut di bidang ini, dengan mempertimbangkan latar belakang yang ada, penelitian ini akan membahas dan mengevaluasi beberapa pertanyaan kunci, seperti:

1. Kompetensi SDM dalam penyusunan laporan keuangan di Kecamatan Batujajar masih belum optimal;
2. Implementasi sistem Pengendalian Internal dalam proses pengelolaan keuangan di Kecamatan Batujajar belum dilaksanakan secara efektif;
3. Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi dan keandalan.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya menyoroti pentingnya isu-isu kritis berikut ini:

1. Seberapa Besar Kompetensi SDM Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?
2. Seberapa Besar Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat?
3. Seberapa Besar Kompetensi SDM dan Pengendalian Internal Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan batujajar Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan wawasan yang relevan mengenai topik yang dibahas, sebagai komponen penting dalam memenuhi persyaratan akademik untuk gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana YPKP, Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengatasi masalah inti yang dipresentasikan, penelitian ini berfokus pada identifikasi sistematis, deskripsi, dan analisis kritis terhadap dinamika antara kompetensi SDM dan kualitas pelaporan keuangan, dengan mengkaji hubungan ini secara khusus dalam konteks Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dengan menawarkan analisis komprehensif tentang interaksi antara kompetensi SDM dan mekanisme pengendalian internal dalam membentuk kualitas pelaporan keuangan, sehingga memperkaya pengetahuan khususnya dalam konteks organisasi pemerintah kecamatan yang kurang diteliti. Temuan penelitian ini berpotensi untuk menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, membuka jalan bagi pengembangan kerangka konseptual baru atau pengulangan penelitian ini dalam konteks yang beragam.

Diharapkan bahwa studi ini akan memperluas cakupan penelitian akademik mengenai variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sektor publik

dan mendorong penelitian empiris lebih lanjut berdasarkan bukti lapangan langsung. Selain itu, penelitian ini berupaya menjawab gap penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada tingkat kabupaten atau kota, dengan menghadirkan perspektif mikro di tingkat kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kompetensi individu dan sistem pengendalian yang kuat secara bersama-sama berkontribusi terhadap laporan keuangan yang akuntabel, sehingga memperkaya pengetahuan teoretis. Secara bersamaan, apa kontribusinya meliputi memperkaya bidang ini melalui validasi kuantitatif alat ukur yang mengukur dampak faktor-faktor tersebut terhadap kualitas pelaporan. Secara keseluruhan, penelitian ini berperan penting dalam memperdalam pemahaman akademis mengenai hubungan antar variabel tersebut di sektor pemerintahan lokal.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat nyata. Penelitian ini membantu pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Batujajar, untuk mengetahui kelemahan dalam pengelolaan laporan keuangan. Hasilnya bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki kompetensi pegawai dan sistem pengawasan agar laporan keuangan menjadi lebih akurat dan terpercaya.

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis dan penerapan teori dalam dunia nyata, khususnya dalam melihat bagaimana SDM dan pengendalian internal memengaruhi kualitas laporan keuangan di sektor publik. Penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk studi selanjutnya, terutama yang ingin meneliti hal serupa di wilayah atau instansi berbeda, atau ingin mengembangkan model penelitian yang lebih kompleks.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Kompetensi SDM merujuk pada kumpulan kemampuan yang diperoleh individu melalui pendidikan formal, pelatihan profesional, dan pengalaman praktis dalam mengatasi tantangan dan melaksanakan tugas yang diamanatkan. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dikembangkan seiring waktu melalui pencapaian akademik dan pengalaman kerja langsung. Kompetensi ini secara langsung memengaruhi efisiensi dan akurasi proses pelaporan keuangan dengan memfasilitasi pengelolaan dan komunikasi informasi keuangan yang efektif. Tingkat kompetensi sumber daya manusia yang tinggi memungkinkan persiapan dan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu, memastikan kepatuhan terhadap batas waktu yang ditetapkan dan standar pelaporan yang berlaku (Pujanira & Taman, 2017).

Manajemen menetapkan pengendalian internal sebagai kerangka kerja organisasi, suatu proses terstruktur yang dirancang untuk secara aktif mendukung tujuan utama seperti integritas keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Struktur ini, sebagaimana dijelaskan oleh COSO (2013), didukung oleh lima pilar dasar: penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, lingkungan pengendalian, serta pemantauan. Seperti yang ditekankan oleh Sumaryati dan Novitasari (2020), sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas pelaporan keuangan di lembaga pemerintah daerah. Dalam konteks Kecamatan Batujajar, efektivitas pengendalian internal sangat menentukan keakuratan dan kelengkapan

laporan keuangan, serta mencegah terjadinya kesalahan atau manipulasi data.

Berdasarkan model COSO dan penelitian Daryanto (2020), dimensi pengendalian internal meliputi:

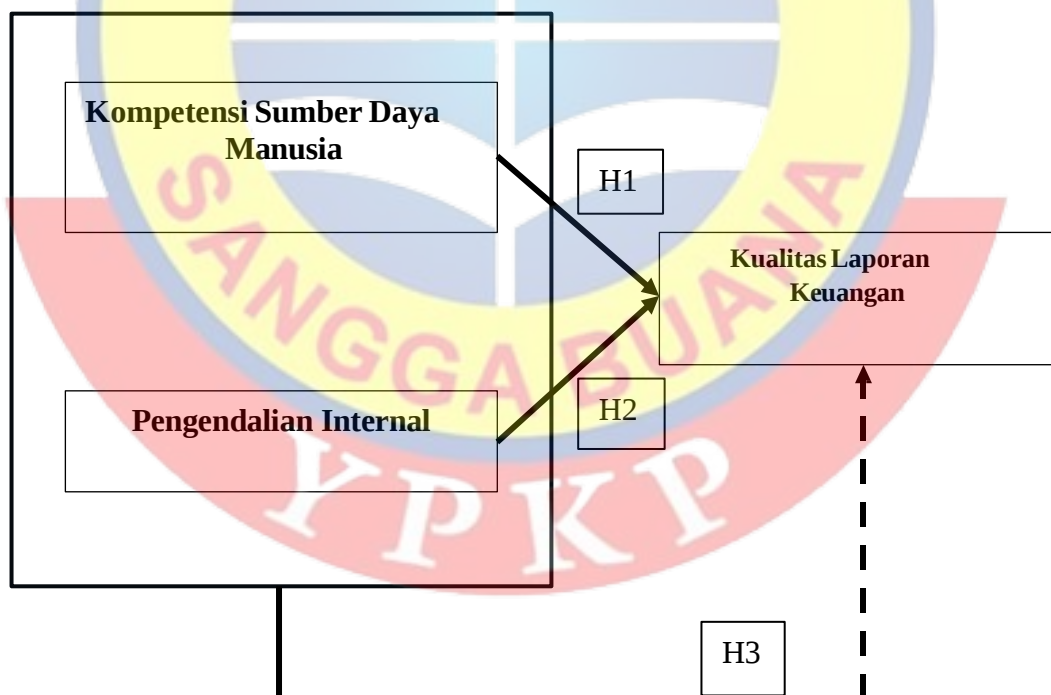
1. Lingkungan Pengendalian: Budaya organisasi dalam mengedepankan akuntabilitas.
2. Penilaian Risiko: Identifikasi risiko kesalahan pelaporan.
3. Kegiatan Pengendalian: Implementasi SOP keuangan dan verifikasi transaksi.
4. Informasi dan Komunikasi: Alur komunikasi internal yang efektif.
5. Monitoring: Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas prosedur yang diterapkan.

Kualitas laporan keuangan mencerminkan keakuratan, ketepatan waktu, relevansi, dan kelengkapan, sehingga memastikan laporan tersebut berfungsi sebagai alat yang berharga bagi pengguna dalam pengambilan keputusan yang terinformasi. Laporan berkualitas tinggi ditandai dengan keandalan dan kejelasan, memungkinkan stakeholder untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan membuat keputusan ekonomi yang tepat. Menurut (IASB, 2018), apa yang membuat laporan keuangan berkualitas tinggi adalah terletak pada ciri-ciri fundamental seperti relevansi, keandalan, keterbandingan, dan keterpahaman. Dalam sektor publik, kualitas laporan keuangan sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara dan daerah. Dewi dan Suhendro (2025) menekankan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat bergantung pada akurasi data, kepatuhan terhadap SAP, dan kekuatan sistem

pengendalian internal (Dewi & Suhendro, 2025). Di Kecamatan Batujajar, kualitas laporan keuangan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel.

Berdasarkan kerangka IASB (2018) dan temuan penelitian Helmy & Silviana (2024), dimensi kualitas laporan keuangan meliputi:

1. Relevansi: Informasi bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
2. Keandalan: Data disajikan tanpa kesalahan material.
3. Keterbandingan: Laporan dapat dibandingkan antar periode dan antar unit.
4. Keterpahaman: Laporan dapat dipahami pengguna umum.



Gambar 1. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: Olahan Penelitian 2025

Keterangan:

X1 = Kompetensi SDM X2 = Pengendalian Internal

Y = Kualitas Laporan Keuangan

1.6.2 Penelitian Terdahulu/Studi Empiris

Untuk memberikan landasan yang kokoh bagi penelitian ini, para peneliti melakukan tinjauan empiris komprehensif terhadap studi-studi sebelumnya, yang menghasilkan wawasan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu/Studi Empiris

N o	Nama & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Daryanto et al. (2020)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penggunaan TI, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi SDM & Pengendalian Internal berpengaruh positif.	Sama-sama menguji pengaruh kompetensi SDM dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik.	Penelitian terdahulu memasukkan TI sebagai variabel tambahan dan cakupan pada pemerintah daerah yang lebih luas; penelitian Anda fokus tingkat kecamatan (Batujajar) tanpa TI.
2	Sumaryati & Novitasari (2020)	Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengaruh signifikan; Sistem Informasi sebagai mediator.	Sama-sama meneliti kompetensi SDM, pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan.	Penelitian terdahulu menggunakan mediasi SIA dan objek pemerintah daerah; penelitian Anda tanpa mediator dan objek kecamatan.

3	Dewi & Suhendro (2025)	Dampak Pengendalian Internal, Kompetensi SDM, dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Terdapat pengaruh positif, diperkuat TI.	Sama-sama menilai kompetensi SDM dan pengendalian internal sebagai penentu kualitas laporan.	Penelitian terdahulu menambahkan komitmen organisasi/TI sebagai penguat; penelitian Anda tanpa variabel komitmen/TI dan fokus pada Kecamatan Batujajar.
4	Lubis et al. (2023)	Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Moderasi Komitmen Kepemimpinan	Terdapat pengaruh positif, diperkuat kepemimpinan.	Sama-sama menilai kompetensi SDM dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.	Penelitian terdahulu menggunakan moderasi komitmen kepemimpinan dan level pemerintah lebih luas; penelitian Anda tanpa moderator dan spesifik kecamatan.
5	Helmy & Silviana (2024)	Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Unit Kerja Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Moderasi	Pengaruh kompetensi SDM diperkuat oleh pengendalian internal.	Sama-sama menguji kompetensi SDM, pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan sektor publik.	Penelitian terdahulu pada unit kerja daerah dengan moderasi SPI; penelitian Anda pada Kecamatan Batujajar dengan dua variabel utama (tanpa moderasi).

Sumber: Olahan Penelitian 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan mendasar dengan studi-studi sebelumnya yang mengkaji hubungan antara kompetensi SDM, pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan. Studi ini secara substansial sejalan dengan kesimpulan yang dihasilkan oleh Daryanto et al. (2020) dan Sumaryati & Novitasari (2020), yang keduanya secara konsisten menunjukkan korelasi positif antara kompetensi SDM, pengendalian internal yang efektif, dan kualitas keseluruhan laporan keuangan. Namun, penelitian ini berbeda dalam hal fokus spesifik pada tingkat kecamatan, sementara penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menyoroti level pemerintah daerah.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan dan kerangka konseptual yang digunakan. Studi Dewi & Suhendro (2025) dan Lubis et al. (2023) memperluas analisis dengan memasukkan variabel teknologi informasi dan komitmen kepemimpinan sebagai faktor penguatan, sementara penelitian ini secara khusus membatasi pada dua variabel utama. Penelitian Helmy & Silviana (2024) memang memiliki kemiripan dalam hal penggunaan pengendalian internal sebagai variabel moderasi, namun lingkup penelitian mereka pada unit kerja daerah menunjukkan perbedaan tingkat analisis.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang terfokus pada level kabupaten/kota, nilai unik penelitian ini terletak pada spesifikasi objek penelitian di tingkat kecamatan-suatu unit pemerintahan yang memiliki karakteristik dan tantangan operasional yang khas dalam penyelenggaraan administrasi keuangan. Dengan memperbesar fokus pada tingkatan pemerintah yang paling dekat dengan

warga, studi ini dapat menghasilkan data empiris yang dapat diimplementasikan untuk memahami mekanisme pelaporan keuangan sektor publik secara lebih baik.

Meskipun penelitian sebelumnya secara konsisten menyoroti hubungan positif antara kompetensi SDM, pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan, penelitian ini menawarkan kontribusi asli yang unik: Spesifikasi level analisis pada tingkat kecamatan yang belum banyak dikaji, Pendekatan yang lebih fokus pada dua variabel kunci tanpa mediator/moderator, Kontekstualisasi empiris di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki karakteristik geografis dan demografis khusus. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi pemahaman akademis sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih operasional dan kontekstual bagi pengelolaan keuangan di tingkat kecamatan.

1.6.3 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam studi ini didasarkan pada sintesis landasan teoritis, temuan dari penelitian sebelumnya, dan realitas empiris yang diamati dalam konteks penelitian. Premis utama penelitian ini adalah adanya hubungan langsung dan signifikan antara kualitas laporan keuangan kecamatan dengan dua faktor internal utama: kompetensi staf dan sistem pengendalian internal yang kuat. Keduanya diyakini berperan sebagai determinan penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sektor publik.

Hipotesis awal didasarkan pada asumsi dasar bahwa kompetensi SDM memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas keseluruhan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Human Capital Theory (Becker, 1964) yang menekankan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman merupakan

bentuk modal manusia yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dalam konteks sektor publik, aparatur yang kompeten mampu menguasai standar akuntansi pemerintahan, memahami prosedur pelaporan, serta menerapkan etika profesional dalam menjalankan tugasnya. Temuan Helmy & Silviana (2024) menyoroti peran krusial kompetensi SM dalam membentuk kualitas laporan keuangan di SKPD. Jika diterapkan pada konteks Kecamatan Batujajar, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur lokal akan secara signifikan meningkatkan kemungkinan produksi laporan keuangan yang andal, relevan, dan tepat waktu.

Selain faktor kompetensi, hipotesis selanjutnya menyoroti peran kritis pengendalian internal, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka kerja COSO (COSO, 2013). Kerangka kerja ini mengidentifikasi lima komponen inti pengendalian internal: a penilaian risiko, ktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, lingkungan pengendalian, serta pemantauan, yang secara kolektif berkontribusi pada efektivitas sistem pengendalian internal. Kelima komponen tersebut dirancang untuk memastikan proses keuangan berjalan sesuai prosedur, mencegah terjadinya kesalahan, dan mendeteksi potensi kecurangan sejak dini. Relevansi pengendalian internal dalam mendukung kualitas pelaporan juga diperkuat oleh *Agency Theory* yang dikemukakan Jensen & Meckling (1976). Dalam perspektif ini, aparatur pemerintah (agent) mengelola sumber daya publik atas nama masyarakat (principal). Adanya pengendalian internal yang kuat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi asimetri informasi dan meminimalisasi konflik kepentingan. Temuan empiris dari Sumaryati & Novitasari (2020) menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis penelitian ini juga mengasumsikan bahwa kompetensi SDM dan pengendalian internal tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan. Aparatur yang kompeten dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem pengendalian dengan benar, sementara pengendalian internal yang kuat menyediakan instrumen pengawasan agar kompetensi yang dimiliki dapat diimplementasikan secara konsisten. Kombinasi dari keduanya menciptakan sinergi yang mampu meningkatkan akurasi, kelengkapan, serta keandalan informasi keuangan yang disajikan. Pandangan ini sangat didukung oleh Daryanto et al. (2020), yang menyoroti bahwa kompetensi SDM dan pengendalian internal secara kolektif memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah di Asia Tenggara.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah disebutkan di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis yang berfokus pada adanya hubungan positif dan secara statistik signifikan, baik secara individu maupun kolektif, antara kompetensi SDM, pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan dalam konteks khusus Kabupaten Batujajar. Sinergi antara kompetensi individu dan pengendalian internal diyakini sebagai landasan utama pelaporan keuangan berkualitas tinggi. Kompetensi individu meningkatkan keahlian teknis dalam penyusunan laporan, sementara pengendalian internal menjamin integritas dan keandalan proses pelaporan. Interaksi ini memastikan bahwa laporan keuangan mematuhi prinsip-prinsip dasar relevansi, keandalan, keterbacaan, dan keterbandingan, sebagaimana

diwajibkan oleh SAP (PP No. 71 Tahun 2010). Melalui pengujian hipotesis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pentingnya faktor internal organisasi dalam memperkuat tata kelola keuangan publik di tingkat kecamatan khususnya Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sekaligus melengkapi temuan penelitian terdahulu yang sebagian besar masih berfokus pada level kabupaten atau kota.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.

1.7.2 Waktu Penelitian

Program penelitian ini berlangsung selama enam bulan, dari Maret hingga Agustus 2025, dan mencakup fase-fase berikut:

1. Studi Pustaka selama enam bulan, dimulai pada Bulan Maret sampai dengan Bulan Agustus 2025.
2. Penelitian Awal/Penelitian Penjajagan selama dua bulan, yaitu pada Bulan Maret dan Bulan April 2025.
3. Pengumpulan Data di Lapangan dilakukan selama dua bulan yaitu pada Bulan Mei dan Bulan Juni 2025
4. Pengolahan dan Analisis data selama dua bulan, yaitu Bulan Juli dan Bulan Agustus 2025.
5. Laporan Hasil Penelitian direncanakan pada Bulan Agustus 2025.

Tabel Jadwal Sederhana:

Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2025

No	Kegiatan						
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Studi Pustaka						
2.	Penelitian Awal/ Penelitian Penjajagan						
3.	Pengumpulan Data di Lapangan						
4.	Pengolahan dan Analisis Data						
5.	Laporan Hasil Penelitian						

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

